



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CAHYA PURNAMA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 799443

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	3.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/220 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	416.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	79.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	55.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	3.850.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	213.750.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	3.636.250.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.